ABSTRAK

Pencemaran laut merupakan permasalahan lingkungan yang berdampak luas terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir, yang dalam banyak kasus melibatkan aktivitas korporasi. penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kasus pencemaran laut yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas korporasi, seperti pembuangan limbah industri, tumpahan minyak, serta sampah plastik, yang berdampak serius terhadap ekosistem laut dan kehidupan masyarakat pesisir. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi serta bagaimana sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi yang melakukan pencemaran laut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana, termasuk adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Selain itu, prinsip pertanggungjawaban seperti identification theory, strict liability dan vicarious liability juga dapat diterapkan dalam konteks kejahatan lingkungan untuk mempermudah pembuktian dan memberikan efek jera. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai sanksi pidana, baik berupa pidana denda, pidana tambahan, maupun tindakan administratif terhadap korporasi yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan laut. Namun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan aparat penegak hukum, serta kurangnya konsistensi dalam penerapan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta komitmen yang lebih kuat dari pemerintah untuk memastikan efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi, sehingga perlindungan terhadap lingkungan laut dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Tanggung jawab pidana, Korporasi, Pencemaran laut, Lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

ABSTRACT

Marine pollution is an environmental problem that has a broad impact on ecosystems and the lives of coastal communities, which in many cases involves corporate activities. This research is based on the increasing cases of marine pollution, mostly caused by corporate activities, such as industrial waste disposal, oil spills, and plastic waste, which have serious impacts on marine ecosystems and the lives of coastal communities. The issues raised in this research include the form of corporate criminal liability and what criminal sanctions can be imposed on corporations that commit marine pollution. This research uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, and utilizes secondary data in the form of laws and regulations, doctrines, and relevant legal literature. The results of the study indicate that corporations as legal subjects can be held criminally responsible if they fulfill the elements of a crime, including the existence of an unlawful act, a mistake, and a causal relationship between the act and the resulting consequences. In addition, principles of responsibility such as identification theory, strict liability, and vicarious liability can also be applied in the context of environmental crimes to facilitate proof and provide a deterrent effect. Law Number 32 of 2009 explicitly stipulates criminal sanctions, including fines, additional penalties, and administrative action against corporations found to have polluted the marine environment. However, in practice, law enforcement still faces various obstacles, such as weak oversight, limited law enforcement personnel, and a lack of consistency in the application of sanctions. Therefore, regulatory strengthening, increased capacity of law enforcement officers, and a stronger commitment from the government are needed to ensure effective law enforcement against corporations, so that marine environmental protection can be achieved optimally and sustainably.

Keywords : Criminal liability, Corporations, Marine pollution, Environment, Law Number 32 of 2009.